

## **PRAKTIK INTOLERANSI DAN KONSTRUKSI NILAI MORAL TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS. (STUDI KASUS PELARANGAN KEGIATAN IBADAH RAYA HARI MINGGU GEREJA GSJA GODEAN LOCERET)**

**Dicky Putra Pratama**

(S1 PPKn, FISH, UNESA) dicky.17040254099@mhs.unesa.ac.id

**Warsono**

(PPKn, FISH UNESA) warsono@unesa.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait dengan praktik intoleransi yang terjadi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang disebabkan oleh konstruksi nilai moral yang menyimpang pada pelaku tindakan intoleransi. Penelitian ini menggunakan teori Berger yaitu Konstruksi Sosial. Praktik intoleransi dan konstruksi nilai moral terhadap pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dianalisis menggunakan teori Konstruksi Sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari satu orang perangkat desa dan 2 orang penduduk setempat dan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan praktik intoleransi yang terjadi di desa godean berupa pelarangan pendirian rumah ibadah dan pelarangan kegiatan ibadah dilatar belakangi oleh: pertama, adanya konstruksi nilai moral yang dibentuk oleh lingkungan yang sedikit menyimpang; kedua, masyarakat yang tidak memahami makna dari toleransi; ketiga: berkembangnya sentimen tentang kelompok lain yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Intoleransi, Konstruksi, Nilai Moral

### **Abstract**

*This study aims to describe the practice of intolerance that occurred in Godean Village, Loceret District, Nganjuk Regency which was caused by the construction of deviant moral values on the perpetrators of acts of intolerance. This study uses Berger's theory, namely Social Construction. The practice of intolerance and the construction of moral values on the fulfillment of the rights of minority groups were analyzed using Social Construction theory. The approach used in this research is qualitative with descriptive design. The data were obtained by using observation, in-depth interviews, and documentation techniques. The informants in this study were 3 people consisting of one village official and 2 local residents and were determined using purposive sampling technique. The results of the study show that the practice of intolerance that occurs in Godean village in the form of prohibiting the establishment of houses of worship and the prohibition of worship activities is motivated by: first, the construction of moral values formed by a slightly distorted environment: second, people who do not understand the meaning of tolerance: third: the development of sentiments about other groups caused by internal and external factors.*

**Keywords:** Intolerance, Construction, Moral Value

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Suatu keragaman yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang heterogen.

Merupakan suatu kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multicultural sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta alam semesta. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman itulah bangsa Indonesia terbentuk (Fidiyani, 2016: 2). Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ini justru berfungsi mempertahankan dasar

identitas diri dan integrasi sosial masyarakat yang ada didalamnya.

Sebagai bangsa yang heterogen bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman didalam seluruh lini kehidupan hal ini ditandai dengan berbagai macam perbedaan baik perbedaan kehidupan politik, sosial, budaya, suku bangsa, adat istiadat maupun agama. Keberagaman bangsa Indonesia disisi lain juga dapat menjadi potensi besar serta dapat memicu munculnya gesekan sosial yang berujung pada konflik horizontal antar elemen masyarakat (Maulana, 2017: 18). Banyaknya tindak kekerasan atas nama agama, baik secara verbal maupun non verbal sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dapat terjadi sebab hubungan antar umat beragama di Indonesia tidak dibarengi dengan

sikap toleran pada masing-masing individu, bahkan mungkin gesekan-gesekan tersebut sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan tertentu (Agung, 2017: 1).

Salah satu bentuk keberagaman yang paling nampak dan sering memicu gesekan di Indonesia adalah keberagaman agama sebab Indonesia bukan negara sekuler, dan bukan pula negara agama. Indonesia adalah Negara yang mengakui dan mengayomi agama-agama lain diluar agama mayoritas yaitu meliputi Kristen, Katholik, Hindhu, Budha dan Kong Hu Cu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika seolah telah mempertegas komitmennya untuk menyatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dengan satu ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hidup tumbuh dan bersatu dalam keberagaman dan harmoni dalam perbedaan, merupakan kata kunci yang tidak bisa diganggu gugat dan harus menjadi komitmen bersama. Membentuk sikap saling menghargai antar pemeluk agama merupakan jalan terbaik dalam upaya melahirkan keharmonisan hidup beragama (Alpijar, 2015: 59).

Toleransi dalam keberagaman harus menjadi komitmen bersama guna menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan. Munculnya sikap intoleransi harus bisa dibendung demi persatuan bangsa Indonesia. Jika berkaca pada masalah bangsa Indonesia hidup dalam suasana sejuk dan damai. Sikap intoleransi dan tindakan radikal berbau agama nyaris tak terlihat. Jikalau memang ada, hanya sebatas gesekan kecil yang timbul karena kesalahpahaman tidak sampai berakhir pada tindak kekerasan. Sebab pada hakekatnya agama itu bukan hanya dipahami sebagai sumber inspirasi dan motivasi hidup, tetapi juga menjadi sumber energi untuk membentuk semangat pembangun kebersamaan dan penumbuh kasih sayang antar sesama.

Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia seolah menjauh dari kodratnya sebagai sebuah bangsa yang memiliki kekayaan multikultural sebagai suatu anugrah yang diberikan sang pencipta. Konfrontasi antar kelompok terutama yang beda agama seolah menjadi pemandangan yang lazim terjadi di bangsa yang dihuni oleh beberapa masyarakat dengan berbagai macam latar belakang agama. Toleransi antar umat beragama semakin menipis, sehingga mudah terjadi konflik hanya karena hal-hal yang kecil, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Dewasa ini menunjukkan bahwa mulai banyak masyarakat yang mengkhianati nilai-nilai kebersamaan yang ada pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Seyogianya Pancasila dipahami sebagai pemecah masalah dalam mengatasi persoalan intoleransi dan segala bentuk praktiknya. Dimana secara tegas dan lugas 3 sila yang terkandung didalam Pancasila yakni: sila

Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila persatuan Indonesia tidak membenarkan segala bentuk sikap intoleransi berserta praktiknya.

Apabila dikaitkan dengan sila-sila yang terkandung didalam Pancasila tindakan intoleransi dan segala bentuk praktiknya sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebab jika dimaknai dengan konsep teologi agama manapun sifat ketuhanan itu tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara-cara yang kurang sesuai dalam mencapai tujuan. Selain itu tindakan intoleransi juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena berawal dari adanya praktik intoleransi akan memicu timbulnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian dan segala bentuk tindakan yang nantinya akan melanggar Hak Asasi Manusia.

Didalam praktiknya tindakan intoleransi juga bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan. Keinginan yang sifatnya memaksa dan merugikan kelompok lain dikhawatirkan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa sebab Indonesia tidak akan bisa menghindar dari kodrat sebagai negara yang heterogen yang memiliki berbagai macam perbedaan. Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila seharusnya dapat dijadikan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun sungguh sangat disayangkan keadaan tersebut terganggu setelah muncul kelompok-kelompok intoleran dan merasa paling benar sehingga memicu lahirnya praktik Intoleransi di Negara ini.

Muncul klaim paling benar antar kelompok agama seakan semakin menjauhkan bangsa Indonesia terhadap nilai persatuan dan kesatuan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Selain itu, rasa ingin menguasai juga seringkali timbul saat suatu kelompok agama memegang posisi sebagai mayoritas yang unggul secara kuantitas. Sikap intoleransi dalam masyarakat yang majemuk tentunya akan memicu lahirnya konflik bahkan sering kali mengarah pada tindakan pelanggaran HAM yang akan dialami oleh kelompok yang lebih lemah dalam hal ini adalah kelompok minoritas.

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena nyata yang terjadi dan dialami oleh Sebagian kelompok minoritas yang berada di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan keterangan dari pengurus gereja setempat sejak tahun 1998 mengalami berbagai macam Tindakan diskriminasi baik secara verbal maupun secara perilaku. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam hal ini adalah kelompok agama Nasrani berupa berbagai

macam tindakan yang mengganggu kelompok Nasrani dalam melakukan peribadatan.

Tindakan diskriminasi tersebut dimulai sejak tahun 1998 karena pada tahun tersebut merupakan tahun awal dari pendirian Gereja di kawasan desa Godean tersebut. Di desa Godean ada sekitar 30 Kartu Keluarga yang beragama Nasrani. Umat Nasrani harus melakukan perjalanan ke pusat kota untuk melakukan peribadatan, sehingga muncul inisiatif dari Majelis Gereja GSJA Kab. Nganjuk untuk membuka cabang di Desa Godean dengan tujuan memudahkan masyarakat khususnya di wilayah Nganjuk bagian Selatan untuk melakukan peribadatan.

Inisiatif tersebut langsung mendapat reaksi penolakan dari masyarakat setempat dengan dalih lokasi pendirian gereja merupakan kawasan muslim yang dekat dengan masjid desa. Dengan pendirian gereja dikhawatirkan akan mengganggu peribadatan masyarakat yang beragama muslim. Kemudian setelah dilakukan mediasi antara kelompok masyarakat dengan perwakilan pihak gereja maka diperoleh keputusan bahwa gereja boleh berdiri di kawasan tersebut namun dalam tata cara peribadahnya tidak diperkenankan untuk memakai *speaker* dan alat musik yang akan mengganggu masyarakat setempat.

Namun ternyata keputusan tersebut bukan merupakan sikap toleransi dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan yang mengarah pada diskriminasi secara verbal yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pengurus gereja. Bukan hanya diskriminasi secara verbal tetapi juga terjadi tindakan melakukan perusakan. Pada malam natal di tahun 2006 ada orang asing yang melakukan perusakan gereja dengan melempar benda tumpul pada kaca depan bangunan gereja. Tindakan tersebut kemudian berlanjut ke perkara hukum dan kemudian diketahui pelakunya merupakan salah satu oknum dari masyarakat setempat

Tindakan intoleransi tersebut terus berlangsung. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 yang berakibat pada penutupan total dan pelarangan ibadah di gereja GSJA Godean yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tindakan tersebut dilakukan dengan dalih gereja tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan penuturan pengurus gereja, pihak gereja sudah berkali-kali mengajukan Izin Mendirikan Bangunan sebagai syarat legalnya bangunan tempat ibadah namun hingga kini belum turun sebab belum memiliki dukungan masyarakat sekurang-kurangnya 60 orang yang disahkan oleh kepala desa dan dengan adanya bangunan gereja seringkali mengganggu aktivitas mobilisasi masyarakat khususnya pada hari besar keagamaan dengan menutup jalan raya. Sungguh hal yang sangat disayangkan dimana pemerintah setempat

tidak bisa menciptakan lingkungan yang humanis dan menghargai perbedaan.

Penelitian ini adalah studi mengenai dampak dari diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelompok minoritas dalam hal ini adalah kelompok Nasrani serta sebagai media kritik terhadap pemerintah yang gagal dalam menekan potensi terjadinya konflik agama yang ada pada masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan nilai moral yang tertanam disebagian besar golongan pelaku diskriminasi. Selain itu penelitian ini juga menyinggung terhadap Tindakan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh konstruksi nilai moral oleh agama.

Banyaknya kasus diskriminasi karena perbedaan agama lah yang menjadi acuan utama kegagalan konsep menjaga toleransi dan kerukunan antar pemeluk agama ini. Konstruksi nilai moral yang dibentuk oleh sosial dan agama juga seakan berhasil menggiring sebagian peraturan daerah agar memarginalkan kelompok-kelompok minoritas. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Sebagai penganut ajaran agama yang tidak lepas dari norma dan nilai moral yang diajarkan di dalam ajaran agama. Meskipun demikian tentu ada beberapa hal yang dengan tidak sengaja membangun nilai benar dan salah terhadap beberapa hal. Nilai-nilai tersebut tentu tidak lepas dari konstruksi pengetahuan (dogma) dari ajaran agama yang diajarkan sejak kecil. Pembentukan nilai-nilai yang ada di dalam perasaan dan akal juga tidak luput dari peran lembaga di luar diri seseorang maupun ajaran agama.

Lingkungan di luar diri (eksternal) juga berperan dalam pembentukan nilai-nilai dan paham yang dianut seseorang. Keluarga sebagai mitra terdekat pada umumnya, merupakan lembaga yang terpenting dan turut membangun nilai benar dan salah seperti yang diajarkan dalam norma-norma agama. Dari ajaran agama, diperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan etika dan tingkah laku.

Haidt (2012: 314) mengungkapkan ada enam nilai inti moral publik yaitu: (1) *Care* : peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama, (2) *Fairness*: rasa keadilan dan kepantasan, (3) *Liberty*: kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, (4) *Loyalty*: kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama, (5) *Authority*: respek terhadap otoritas yang dihormati bersama, (6) *Sanctity*: menjunjung tinggi nilai utama yang dianggap paling suci/utama. Bagi bangsa Indonesia, inti moral public sebagai ikatan persatuan telah terkandung di dalam Pancasila. Mengacu pada pendapat Haidt tersebut permasalahan yang terjadi di desa Godean menunjukkan bahwa terjadi penyelewengan

terhadap nilai-nilai suci bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Konstitusi negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditujukan dengan adanya jaminan kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi kelompok agama tertentu dijamin di dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktiknya pemerintah sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik agama dengan pembedaan hak dan pemberian keistimewaan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya dalam mengurus hal yang sifatnya administratif semacam surat Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan syarat legal dalam pendirian rumah ibadah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik intoleransi dan konstruksi nilai moral masyarakat Ds. Godean Kec. Loceret Kab. Nganjuk dalam pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan praktik Inroleransi yang terjadi di Lingkungan Ds. Godean Kec. Loceret yang diduga dipengaruhi oleh konstruksi nilai moral yang menyimpang. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman pelaku intoleransi terhadap agama Nasrani dan pemeluk agama Nasrani.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang menggali suatu fenomena atau kasus secara terperinci dan mendalam pada waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data untuk menggambarkan respon dari suatu peristiwa pada periode tertentu (Cresswell, 2003: 15). Argumentasi menggunakan metode studi kasus karena penelitian ini hanya fokus pada pemicu munculnya sikap intoleran yang berdampak pada munculnya diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kaum minoritas yang dalam hal ini adalah kelompok nasrani yang berkaitan dengan SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan), serta praktik intoleransi yang diakibatkan oleh konstruksi nilai moral yang menyimpang.

Hal tersebut dikaitkan dengan nilai moral yang tertanam di sebagian besar golongan pelaku diskriminasi. Studi ini juga menyinggung pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh konstruksi nilai moral oleh agama. Pancasila sebagai dasar negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konstruksi nilai moral yang dibentuk oleh masyarakat dan agama juga berhasil menggiring

beberapa individu untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Terdapat dua fokus dalam penelitian ini, yang pertama adalah praktik intoleransi yang dipengaruhi oleh konstruksi nilai moral. Sebagai umat beragama tidak sikap dan perilakunya tidak lepas dari norma dan nilai moral yang diajarkan di dalam agama. Ada beberapa hal yang dengan tidak sengaja membangun nilai benar dan salah terhadap beberapa hal yang ditemui. Nilai-nilai tersebut tentu tidak lepas dari konstruksi pengetahuan (dogma) dari ajaran agama yang diterima sejak kecil. Pembentukan nilai-nilai yang ada di dalam perasaan dan akal seseorang tidak luput dari peran lembaga di luar dirinya. kitab dan catatan-catatan di dalam kitab ajaran agama saja. Lingkungan di luar (eksternal) juga berperan dalam pembentukan nilai-nilai dan paham yang dianut seseorang.

Kemudian fokus penelitian yang kedua adalah pemenuhan hak kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam hal beribadah. Fokus penelitian ini mengarah pada bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam hal pemenuhan hak terhadap kelompok minoritas dalam hal ini adalah jemaat GSJA Godean Loceret. Dengan mengarahkan fokus ke problem tersebut diharapkan akan terkuak kontruksi masyarakat setempat untuk melarang kegiatan ibadah jemaat GSJA Loceret. Apakah kontruksi tersebut berasal dari intervensi atau berasal dari disfungsi tindakan moral. Tentunya hal semacam ini harus segera dicari akar masalahnya supaya tidak mengganggu eksistensi Pancasila sebagai ideologi yang menjunjung tinggi nilai moral.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung tentang praktik intoleransi yang diakibatkan oleh konstruksi nilai moral. Metode observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan, penginderaan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sebelum melakukan wawancara, perlu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Oleh karena itu, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dikategorikan kedalam jenis wawancara terstruktur.

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik berupa gambar maupun

rekaman suara terkait masalah yang ada dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah konstruksi nilai moral oleh agama pada masyarakat setempat sehingga melakukan tindakan intoleransi yang mengarah pada tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi.

Pengecekan data hasil wawancara dilakukan melalui teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara pengecekan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Data yang diperoleh dari satu informan dapat dicek kepada informan lain menggunakan teknik yang sama. Triangulasi sumber dalam penelitian ini diperoleh dari pengecekan kesesuaian data hasil wawancara mendalam dengan tiga informan yakni: bapak Sugeng Kamdani, bapak Supar, dan saudara Riyan Adi. Dengan metode ini data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat diakui kebenarannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif dimulai dari data yang sudah tersedia atau terkumpul kemudian direduksi dengan cara memilih, menyederhanakan, menggolongkan data, dan membuang data yang tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan data apa saja yang perlu diambil. Selanjutnya menghubungkan dan membandingkan antara teori yang ada dengan hasil praktik di lapangan kemudian mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang dicari.

Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Luckmann. Kedua tokoh ini menyatakan bahwa kenyataan atau realitas merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, yang secara sederhana dapat dipahami bahwa tiap individu mempunyai pandangan tersendiri terhadap realitas yang ada kemudian konstruksi tiap individu tersebut didasari dengan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Didalam teori ini Berger menjelaskan bahwa pengetahuan secara kolektif kelompok yang fanatik dapat menimbulkan objektivasi secara individu sebagai pandangan berbeda terhadap realitas sosial.

Dengan berpijak pada teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann tersebut tindakan intoleransi yang terjadi berupa pelarangan kegiatan ibadah bagi umat Nasrani yang dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat dilatarbelakangi oleh konstruksi sosiologi pengetahuan lingkungan dan keyakinan yang diakibatkan dari internalisasi kolektif pelaku intoleransi yang kemudian dari internalisasi tersebut akan membentuk suatu realitas sosial yang kemudian dinamakan eksternalisasi yang mengarah pada tindakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Intoleransi yang Dipengaruhi Oleh Konstruksi Nilai Moral

Praktik intoleransi yang dipengaruhi oleh konstruksi nilai moral yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik agama yang ada pada masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan nilai moral yang tertanam di sebagian besar golongan pelaku diskriminasi. Setiap perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konstruksi nilai moral yang diyakini oleh seorang individu. Konstruksi tersebut terlahir dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pembahasan akan terfokus pada (1) Konstruksi nilai moral pada kelompok mayoritas. (2) Bentuk tindakan intoleransi kelompok mayoritas terhadap minoritas.

#### Konstruksi Nilai Moral pada Kelompok Mayoritas

Konstruksi nilai moral yang ada pada setiap individu ternyata berpengaruh terhadap tindakan setiap individu atau cara Individu dalam memperlakukan kelompok lain diluar komunitasnya, seperti yang terjadi di Desa Loceret. Ada sebagian kelompok yang merasa terganggu dan ada juga yang menerima keberadaan gereja di lingkungan mayoritas muslim. Hal ini selaras dengan data wawancara sebagai berikut:

“...kalau saya pribadi sebenarnya tidak masalah dengan adanya tempat ibadah umat kristiani diwilayah kami, namun problem yang terjadi disini juga tidak dilakukan oleh semua pihak hanya oknum tertentu saja yang kebetulan warga kami yang beragama muslim...” (Data primer: wawancara 23 April 2021, Sugeng Kamdani).

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas, dapat dianalisis bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang menerima kehadiran kelompok kristiani di lingkungan mayoritas muslim. Namun ada juga kelompok masyarakat yang kontra dengan hadirnya kelompok kristiani di tengah-tengah pemukiman mayoritas muslim. Hal ini didukung oleh pernyataan informan berikut:

“...Saya sebagai warga yang sudah tinggal lama di sini kalau boleh jujur sedikit risih mas, merasa terganggu apabila mereka sedang melaksanakan ibadah apalagi kalau diadakan malam hari...” (Data Primer: Wawancara 23 April 2021, Supar).

Berdasarkan pemaparan dari informan tersebut menunjukkan bahwa ternyata masih ada oknum masyarakat yang merasa risih apabila ada bangunan gereja di tengah-tengah lingkungan muslim. Berbanding terbalik dengan informan kedua, informan yang ketiga terlihat sangat menerima apabila ada bangunan gereja di tengah-tengah lingkungan mayoritas muslim. Berikut merupakan data hasil wawancara dengan informan:

“...kalau saya pribadi selama tidak mengganggu kita sebagai orang muslim saya tidak masalah...”

(Data Primer, Wawancara 23 April 2021, Riyan Adi).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran tempat ibadah berupa gereja masih diterima oleh sebagian masyarakat asalkan tidak mengganggu masyarakat yang beragama islam. Kemudian dari pertanyaan tersebut diajukan pertanyaan kembali guna melengkapi data penelitian terkait dengan kehadiran tempat ibadah berupa gereja. Apakah menimbulkan rasa tidak nyaman pada masyarakat sekitar. Informan yang pertama langsung memberikan jawaban sebagai berikut:

“...kalau dikatakan kurang nyaman tidak terlalu namun terkadang suara speaker dan alat-alat musik sedikit mengganggu, apalagi kalau hari minggu pagi waktunya istirahat kalau sudah terdengar suara music jadi sedikit terganggu apalagi kondisi bangunan gereja yang kecil jadi suara menggema kemana-mana...” (Data Primer, Wawancara 23 April 2021, Sugeng Kamdani).

Fakta bahwa masih ada sebagian masyarakat yang masih merasa kurang nyaman apabila ada bangunan gereja di tengah-tengah lingkungan mayoritas muslim. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh informan yang kedua sebagai berikut:

“...Awalnya dulu biasa-biasa saja kami bersikap selayaknya sama tetangga yang lain tapi sekarang jadi gimana gitu makin merasa risih saja mas kayak kurang nyaman...” (Data Primer, Wawancara 24 April 2021, Supar).

Selayaknya sebuah dinamika ada yang pro dan ada yang kontra. Di dalam dinamika tersebut ada juga yang bersikap dewasa dalam mensikapi perubahan. Seperti yang disampaikan oleh informan yang ketiga sebagai berikut:

“... awalnya dulu saya merasa risih mas karena mungkin belum terbiasa tapi sekarang saya sudah terbiasa dengan adanya bangunan gereja ditengah-tengah pemukiman kami...” (Data Primer, Wawancara 24 April 2021, Riyan Adi).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang merasa risih dan terusik dengan adanya bangunan gereja di tengah-tengah pemukiman mayoritas muslim.

Dari kedua pertanyaan di atas kemudian dilanjutkan pada bagaimana persepsi warga mayoritas tentang agama Kristen sebab permasalahan yang terjadi sangat mungkin sebagai akibat dari adanya salah persepsi, yang kemudian mengarah pada sentimen kepada kelompok agama lain. Kemudian untuk menggali hal lebih mendalam untuk melengkapi data penelitian. Maka diajukan pertanyaan pada informan, tentang konstruksi warga mayoritas terhadap terhadap agama lain.

Warga mayoritas tetap meyakini bahwa agama yang diyakini adalah yang terbaik, namun warga setempat juga

menghargai terhadap pemeluk agama lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“...Iya kalau menurut saya karena saya penganut agama Islam tetap agama islam yang terbaik tapi berhubung kita hidup di Indonesia yang beraneka ragam harus saling menghargai...” (Data Primer, Wawancara 24 April 2021, Sugeng Kamdani).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas menunjukkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang merasa bahwa agamanya paling benar dan menyalahkan agama lain. Konstruksi yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh informan yang kedua, yang menyatakan:

“... sebagai orang Islam saya menganggap agama Islam yang terbaik saya tidak tau Kristen seperti apa yang saya tahu cara mereka beribadah itu aneh mas...” (Data Primer, Wawancara 24 April 2021, Supar).

Bertolak dari kontruksi seperti inilah yang memicu lahirnya konflik agama. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan informan di atas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di desa Loceret muncul karena sentimen yang berawal dari adanya rasa dan klaim paling benar. Namun demikian, masih ada juga masyarakat yang lebih toleran dan menghargai agama orang lain. Seperti yang disampaikan oleh informan ke tiga sebagai berikut:

“...menurut saya agama yang memiliki 3 Tuhan namun terlepas dari siapa yang mereka sembah saya tetap menghargai mas...” (Data Primer, Wawancara 24 April 2021, Riyan Adi).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan yang ketiga, menunjukkan bahwa masi ada sebagian pemeluk Islam yang toleran terhadap agama lain. Meskipun agama merupakan keyakinan dan sensitif namun ada juga kelompok masyarakat yang cenderung lebih toleran dan menerima dengan hadirnya bangunan gereja dan kelompok Kristiani di lingkungannya.

Berangkat dari polemik yang sudah terlanjur terjadi maka seharusnya diperlukan musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat supaya hal semacam ini tidak terulang kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan ksebagai berikut:

“...seharusnya musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat itu perlu sebab yang kita hadapi juga orang banyak dan tidak semua orang menerima adanya bangunan gereja dilingkungan mereka ...” (Data Primer, Wawancara 25 April 2021, Sugeng Kamdani).

Berdasarkan pernyataan diatas membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima hadirnya tempat ibadah berupa gereja oleh karena itu perlukan musyawarah terlebih dahulu. Namun di sisi lain ada juga yang secara toleran bisa menerima rencana

pembangunan gereja, dengan persyaratan tertentu, seperti tidak mengganggu umat muslim. Oleh karena itu, perlu dilakukan musyawarah agar bisa disepakati secara bersama. Perlunya musyawarah ini, disampaikan oleh informan yang kedua, sebagai berikut:

“...musyawarah itu sangat perlu sebab banyak dari kita yang tidak tau kalau lokasi tersebut akan dibangun gereja sehingga awalnya kami bersikap biasa dan tidak ada penolakan...” (Data Primer, Wawancara 25 April 2021, Supar).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa rencana pembangunan gereja tidak dimintakan persetujuan atau melibatkan warga lain terutama umat muslim. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan informan yang merasa tidak pernah mendapatkan ajakan untuk musyawarah tentang pendirian gereja sehingga apa yang terjadi sekarang merupakan ekspresi kemarahan dari oknum masyarakat tertentu.

Pelibatan masyarakat terutama dari kalangan umat islam dalam pembangunan gereja sangat diperlukan, agar seluruh elemen warga bisa memahami dan memperoleh informasi yang utuh, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini:

“...Menurut saya musyawarah menjadi hal-hal yang sangat perlu supaya tidak terjadi salah persepsi satu sama lain...” (Data Primer, Wawancara 25 April 2021, Riyan Adi).

Kegiatan ibadah dari kaum kristiani yang menggunakan pengeras suara, juga menyebabkan masyarakat di sekitar merasa terganggu. Apalagi suara tersebut dianggap terlalu keras, tidak sebanding dengan jumlah umat kristen yang beribadah. Memang jumlah umat Kristen relative sedikit bila dibandingkan dengan jumlah umat islam. Penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan dari umat Kristen selain tidak perlu, karena bisa mengganggu umat muslim. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut ini:

“...Kalau ditanya merasa terganggu pasti terganggu mas apalagi waktu suara speaker yang tidak sesuai dengan luas bangunan akibatnya mengganggu lingkungan sekitar...” (Data Primer, Wawancara 25 April 2021, Sugeng Kamdani).

Konflik yang terjadi saat ini merupakan muara dari konflik yang berawal dari sebagian kelompok yang merasa risih bukan hanya karena adanya bangunan gereja, namun juga disebabkan oleh kehadiran tamu-tamu yang berasal dari daerah lain, terutama saat hari-hari besar keagamaan. Kehadiran tamu-tamu tersebut seringkali juga menimbulkan keresahan warga, karena umat Nasrani memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yang kedua, berikut ini:

“...Terganggu itu pasti selain terganggu karena suara speaker kita juga resah waktu hari besar mereka banyak tamu yang datang dan kendaraan dari tamu diparkir sembarangan yang mengganggu mobilitas penduduk disini...” (Data Primer, Wawancara 25 April 2021, Supar).

Pada awalnya pelaksanaan ibadah umat Kristen tidak dianggap sebagai masalah. Malah menimbulkan rasa penasaran dari masyarakat, terutama umat islam. Sebagian warga menganggap bahwa cara beribadah umat Kristen sebagai suatu kelucuan. Hal ini bisa dimaklumi, karena cara beribadah umat Kristen jelas berbeda dengan umat Islam. Bagi umat Islam yang tidak pernah tahu tatacara ibadah umat Kristen, tentu merasa heran dan dianggap sebagai hal yang aneh, seperti yang disampaikan oleh informan yang ketiga berikut ini:

“... Kalau dahulu waktu awal-awal saya bukan merasa terganggu tapi lebih kearah ketawa karena cara ibadah mereka lucu dan mungkin baru pertama kali saya melihat sehingga terlihat aneh namun sekarang saya merasa biasa saja dan tidak merasa terganggu sama sekali...” (Data Primer, Wawancara 25 April 2021, Riyan Adi).

Namun setelah mengetahui dan memahami bahwa setiap agama memiliki tatacara beribadah yang berbeda, warga setempat menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Warga juga tidak lagi merasa aneh dengan cara beribadah umat Kristen, yang memang berbeda dengan cara beribadah umat Islam.

### **Pemenuhan Hak Kelompok Mayoritas terhadap Minoritas dalam Beribadah**

Permasalahan yang terjadi antara umat Islam yang mayoritas dengan umat kristen yang minoritas disebabkan adanya ketimpangan informasi dan sentimen buruk kepada entitas tertentu dalam hal ini adalah kelompok Kristiani yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua orang mampu menerima adanya perbedaan dan menganggap ada kesetaraan dalam perbedaan. Konflik ini terjadi karena adanya klaim paling benar dan sikap superior. Umat Islam jumlahnya lebih banyak merasa lebih unggul.

Kemajemukan masyarakat Indonesia sejak awal sudah disadari oleh para pendiri negara, sehingga semboyan yang dibangun adalah Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tunggal Ika hanya dimaknai ada perbedaan, tetapi tidak disertai dengan adanya kesetaraan diantara perbedaan tersebut. Beberapa elemen masyarakat masih menganggap adanya mayoritas dan minoritas.

Bagi warga setempat penyelesaian permasalahan ini harus melibatkan pemerintah, karena melibatkan orang banyak. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi konflik antar masyarakat yang berkaitan

dengan pendirian gereja, sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen. Perlunya keterlibatan pemerintah diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“...terkait dengan apa yang terjadi di desa ini apakah sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika tentunya tidak mas. Namun permasalahan ini melibatkan orang banyak jadi diperlukan penyelesaian serius dari pemerintah...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Sugeng Kamdani).

Penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut, kemudian semakin membesar menjadi penolakan terhadap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen. Penggunaan pengeras suara dan kehadiran jamaah yang bukan warga setempat pada saat dilakukan ibadah, telah menimbulkan gangguan kepada masyarakat sekitar. Bahkan beberapa oknum warga setempat saat ini menuntut untuk dilakukan pemindahan tempat ibadah, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“... Menurut saya apa yang dilakukan masih wajar sebab kita awalnya hanya menolak bangunan fisik berupa gereja namun karena tidak digurau kita kemudian melarang total kegiatan ibadah mas sebab lingkungan sini sudah merasa risih jadi mending daripada konflik berlarut-larut saran saya mereka harus merelokasi...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Supar).

Meskipun demikian, sebenarnya tidak semua warga (umat Islam) melakukan penolakan terhadap kehadiran gereja. Masih ada juga yang memiliki sikap toleransi, dalam menanggapi adanya perbedaan agama. Ada sebagian warga menganggap bahwa perbedaan merupakan hal yang harus diterima, karena setiap orang memiliki hak untuk mengikut agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan itu dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Namun karena warga yang memiliki toleransi itu jumlahnya hanya sedikit. Mereka pun tidak bisa melawan kehendak warga lain yang menolak karena jumlahnya lebih banyak. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“... sudah jelas melanggar dan tidak sesuai azas Bhinneka Tunggal Ika tapi mau bagaimana lagi masih banyak orang-orang disini yang masih kaku dan belum bisa menerima mereka...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Riyan Adi).

Berdasarkan pemaparan narasumber yang ketiga dapat dianalisis bahwa narasumber yang ketiga membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat tersebut adalah menciderai azas Bhinneka Tunggal Ika. Berawal dari pernyataan-pernyataan diatas ditemukan temuan menarik dimana masih banyak oknum masyarakat yang tidak memaknai hakekat dari toleransi. Dimana hal ini

diperkuat oleh pernyataan dari informan, berikut adalah ada hasil wawancara:

“...Kalau menurut saya pribadi dengan kita tidak mengganggu mereka itu sudah bentuk toleransi tapi kalau apa yang terjadi sekarang dikaitkan dengan tindakan intoleransi saya kurang setuju sebab selama ini kami juga tidak pernah melarang mereka ibadah namun jika saat ini ada oknum masyarakat kami yang melakukan boikot untuk pelarangan ibadah secara total menurut saya itu ada alasannya salah satunya adalah IMB...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Sugeng Kamdani).

Berdasarkan pernyataan dari informan maka dapat dianalisis bahwa ternyata masih terdapat oknum masyarakat yang belum bisa memaknai makna dari toleransi sehingga sebagian oknum masyarakat tersebut merasa benar saat bertindak tanpa memikirkan hak orang lain. Berangkat dari pernyataan inilah didapatkan informasi yang lebih mendalam tentang seberapa jauh tingkat pemahaman warga setempat tentang toleransi. Disini peneliti memberikan pertanyaan yang sifatnya opsional atau pilihan. Berikut merupakan data hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

“...Kalau saya lebih memilih memilih mempersilahkan umat Kristiani mendirikan tempat ibadah kita juga tidak pernah mengusik keberadaan mereka selama mereka juga tidak mengganggu kita saya pribadi tidak masalah...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Sugeng Kamdani).

Berdasarkan pemaparan dari informan dapat dipahami bersama bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang menerima adanya tempat ibadah berupa gereja namun dengan catatan apabila tidak mengganggu. Namun informan tidak menjelaskan secara jelas terkait gangguan yang dimaksudkan itu seperti apa dan dalam bentuk apa. Namun informan berikutnya memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh informan yang pertama, berikut adalah data hasil wawancara:

“...saya memilih membiarkan mereka mendirikan tempat ibadah tapi ditempat lain bukan dilingkungan kami...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Supar).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh informan dapat dianalisis bahwa informan tersebut secara terang-terangan menolak kehadiran tempat ibadah berupa gereja ditengah-tengah lingkungannya. Kemudian pernyataan yang hampir sama dengan informan yang ketiga dengan informan yang pertama, berikut merupakan data hasil wawancara dengan informan:

“...saya lebih memilih hidup berdampingan dan membiarkan mereka mendirikan tempat ibadah, saya malu disini nama baik desa dipertaruhkan



apabila masih ada konflik secara terus-menerus...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Riyan Adi).

Berdasarkan pernyataan dari informan yang ketiga yang menyampaikan keresahannya apabila ada konflik yang berkelanjutan maka nama baik desa yang dipertaruhkan. Kemudian guna melengkapi data diperlukan pernyataan dari 3 informan terkait perlunya keterlibatan pemerintah guna menyelesaikan masalah ini. Berikut merupakan data hasil wawancara dengan informan:

“...pemerintah harus mengambil reaksi cepat karena ini adalah konflik yang berlarut-larut dimana yang dipermasalahkan sebagian besar pelaku tindakan boikot adalah izin pendirian rumah ibadah...” (Data Primer, Wawancara 27 April 2021, Sugeng Kamdani).

Berangkat dari pemaparan yang disampaikan oleh informan di atas dapat dianalisis bahwa konflik yang terjadi timbul dan salah satu faktornya adalah lambatnya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga disintegrasi yang ditimbulkan dari adanya sentimen terhadap kelompok lain bisa terjadi. Kemudian reaksi yang sedikit berbeda disampaikan oleh informan yang kedua, berikut adalah data hasil wawancara dengan informan:

“...menurut saya pemerintah harus memahami apa yang menjadi keresahan kita kami cuman takut dengan hadirnya tempat ibadah berupa gereja membawa dampak yang kurang baik bagi lingkungan...” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Supar).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh informan yang kedua dapat dianalisis bersama bahwa informan begitu terang-terangan menolak adanya bangunan gereja karena ditakutkan membawa dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Berbeda dengan informan yang kedua informan yang ketiga memberikan pendapat lain, berikut adalah data hasil wawancara:

“...menurut saya pemerintah harus segera mengedukasi mereka yang bersumbu pendek masak ada umat agama lain ibadah merasa terganggu...” (Data Primer Wawancara 29 April 2021, Riyan Adi).

Penolakan terhadap kehadiran gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen tersebut juga disebabkan karena adanya propokasi dari oknum tertentu. Ada oknum-oknum yang tidak suka dengan kelompok kristiani, yang kemudian mempropokasi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap kehadiran gereja di lingkungan tersebut. Namun banyak dari warga setempat yang menganggap penolakan terhadap tempat dan pelaksanaan ibadah umat Kristen juga tidak berani melawan, meskipun warga tersebut sebenarnya tahu bahwa hal tersebut merupakan bentuk intoleransi dan

tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan berikut:

“...Menurut saya apa yang terjadi itu pasti ada provokasi sebelumnya namun saya juga tidak berani memastikan...” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Sugeng Kamdani).

Oleh karena itu, menurut sebagian warga yang bisa memahami makna Bhinneka Tunggal Ika mengharapkan pemerintah memberikan edukasi lebih pada kelompok-kelompok yang terindikasi melakukan tindakan intoleransi supaya tidak terulang kembali.

Penolakan terhadap keberadaan tempat ibadah kaum nasrani saat ini sebenarnya merupakan klimaks dari konflik yang panjang. Berawal dari sentimen keagamaan yang kemudian ditambah dengan adanya propokasi dari oknum tertentu yang memang tidak suka dengan agama lain, konflik tersebut menjadi semakin sulit untuk diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu perlu peran dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“...menurut saya karena ada dorongan lingkungan dan muncul rasa penolakan dari dalam diri sehingga apa yang terjadi sekarang merupakan klimaks dari apa yang kami rasakan...” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Supar).

Berdasarkan pemaparan dari informan menunjukan bahwa ada konstruksi nilai moral yang sedikit menyimpang yang mana hal itu dibentuk oleh lingkungan yang melatar belakangi tindakan boikot terhadap ibadah umat Kristen bisa terjadi hal ini dilatar belakangi oleh rasa tidak suka dan rasa sentimen yang berlebihan kepada kelompok/komunitas lain diluar mayoritas warga setempat. Terkait permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya kelompok yang tidak suka dipertegas kembali oleh pernyataan dari informan yang ketiga, berikut adalah data hasil wawancara dengan informan:

“...menurut saya ada kelompok yang benar-benar tidak suka dengan kelompok agama Kristen yang kebetulan mendiami lingkungan disekitar gereja...” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Riyan Adi).

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan diatas digali kembali terkait dengan pemahaman warga terhadap tindakan yang telah dilakukan. Berikut adalah data wawancara dengan informan:

“...sebenarnya saya juga tidak membenarkan tindakan boikot semacam ini mas namun apa yang terjadi sekarang merupakan muara dari konflik yang berkelanjutan dan rata-rata masyarakat kami yang tinggal disekitar gereja tidak suka dengan adanya bangunan gereja disekitar mereka...” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Sugeng Kamdani).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh informan yang kedua, berikut adalah data hasil wawancara bersama informan:

“... saya kurang setuju apabila tindakan yang kami lakukan dikaitkan dengan tindakan intoleransi sebab kami juga tidak merugikan mereka secara materil kami hanya memasang spanduk larangan saja” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Supar).

Berdasarkan pemaparan dari informan yang kedua dapat dianalisis bersama bahwa informan tidak menerima apabila tindakan yang dilakukan dikatakan tindakan intoleransi. Berangkat dari hal inilah dapat dipahami bersama ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memahami makna dari toleransi seutuhnya. Sehingga muncul rasa kurang senang apabila ada kelompok lain yang berbeda dengan kelompok mayoritas hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan yang ketiga, berikut adalah hasil wawancara dengan informan:

“...semua tindakan boikot yang terjadi itu 414 ilator belakanginya munculnya rasa seenaknya sendiri sebab unggul secara kuantitas...” (Data Primer, Wawancara 29 April 2021, Riyan Adi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi di desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terjadi dan dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang pertama adanya konstruksi nilai moral yang dibentuk oleh lingkungan yang sedikit menyimpang, kemudian yang kedua masih banyak masyarakat yang tidak memahami makna dari toleransi, yang ketiga berkembangnya sentimen tentang kelompok lain yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal.

## Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas terkait praktik intoleransi dan konstruksi nilai moral yang terjadi di lingkungan desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, didapati fakta-fakta baru terkait apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan 3 faktor pemicu timbulnya praktik intoleransi. Faktor yang pertama adanya konstruksi nilai moral yang dibentuk oleh lingkungan yang sedikit menyimpang, kemudian yang kedua masih banyak masyarakat yang tidak memahami makna dari toleransi, yang ketiga berkembangnya sentimen tentang kelompok lain yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan-informan tentang permasalahan intoleransi yang terjadi di desa Godean. Faktor pertama yang memicu permasalahan ini terjadi adalah adanya konstruksi nilai moral yang menyimpang

atau kurang sesuai yang ada dan tumbuh pada sebagian besar pelaku intoleransi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang dilakukan dengan sadar namun sebagian oknum warga menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan apa yang diyakini. Dari adanya hal ini kemudian memicu perilaku-perilaku yang dikhawatirkan akan mengusik eksistensi kelompok lain yang tidak satu tujuan atau satu pandangan dengan kelompok mayoritas.

Adanya konstruksi nilai moral yang menyimpang ini diperkuat oleh temuan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dimulai dari pernyataan informan yang menyatakan adanya rasa risih dan terganggu apabila umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah. Timbulnya perasaan risih dan terganggu ini merupakan modal awal dari timbulnya segala bentuk praktik intoleransi.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri sebagian kelompok intoleran apabila ada umat Kristiani sedang menjalankan ibadah. Apabila dianalisis dengan dasar pernyataan dari salah satu informan yang menyatakan bahwa beliau tidak mempermasalahkan kehadiran umat Kristiani asalkan tidak mengganggu umat muslim. Pernyataan tersebut seolah mempertegas bahwa muncul sebuah ketakutan bahwa dengan hadirnya umat Kristiani dikhawatirkan akan mengganggu Aqidah warga setempat yang beragama muslim.

Dalih-dalih tersebut merupakan suatu sikap yang sangat berlebihan dimana tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan praktik intoleransi seolah dibenarkan oleh agama dengan alasan menjaga aqidah agama dan hal ini diyakini sebagai suatu prinsip yang harus dijaga. Tentunya hal ini sangat disayangkan sebab pada dasarnya agama bukan tameng untuk melindungi segala bentuk perilaku yang mengarah pada bentuk penindasan seluruh umat manusia.

Munculnya perspektif terhadap agama lain yang menganggap agama lain itu tidak sesuai dan berhak ditindas karena berbeda aqidah dinilai juga akan memicu timbulnya praktik intoleransi. Sebab dengan adanya perspektif inilah akan timbul rasa tidak suka yang berlebihan dan akan mengesampingkan aspek kemanusiaan. Hal ini selaras dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa agama Kristen menurut pandangan beliau merupakan agama aneh tidak jelas siapa yang disembah. Berdasarkan pernyataan ini apabila dilihat menggunakan konteks teologi agama tentunya tidak ada yang salah sebab seluruh agama adalah benar dimata penganutnya namun apabila sudah berbicara pada konteks berbangsa dan bernegara tentunya sikap semacam ini tidak dibenarkan.

Didalam praktiknya sangat susah membentuk konstruksi nilai moral seperti menghargai dan menghormati kemerdekaan kehidupan orang lain, bersikap adil, memiliki belas kasih antar sesama, menjaga toleransi antar umat yang semuanya itu merupakan penentu dalam membentuk pribadi yang baik. Apalagi didalam suatu lingkungan terdapat berbagai macam kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai macam pandangan.

Faktanya masih banyak pelaku intoleran yang tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan menyimpang dengan merenggut kemerdekaan kehidupan orang lain. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan informan yang membenarkan tindakan boikot dengan pemasangan spanduk bernada SARA didepan gereja GSJA Godean Loceret dengan dalih itu merupakan peringatan bukan merupakan tindakan intoleransi yang mengarah pada kekerasan.

Hal ini bisa terjadi akibat dari adanya penalaran moral yang kurang sesuai atau dapat dikatakan menyimpang sebab seorang individu akan dihadapkan pada dilema perbuatan moral, sehingga ia diminta melakukan pemilihan keputusan moralnya berdasarkan penalaran moral itu. Didalam penalaran moral ini seorang individu memaknai prinsip moral tidak sekadar merupakan aturan bagi suatu tindakan, melainkan sekaligus merupakan alasan orang bertindak (Liebert, 1992: 301).

Apabila dianalisis menggunakan pisau analisis teori konstruksi sosial menurut Peter L Berger dan Luckmann, menjelaskan bahwa suatu kenyataan atau realitas merupakan suatu hal yang bersifat subjektif atau dalam kata lain dapat dimaknai sebagai suatu pandangan tersendiri dari individu terhadap realitas yang ada kemudian konstruksi setiap individu didasari dengan internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi. Kemudian apabila dikaitkan dengan faktor timbulnya praktik intoleransi yang pertama berupa dari adanya konstruksi moral maka dapat dianalisis bahwa terjadi salah persepsi dalam proses penerimaan pengetahuan terhadap individu tersebut kemudian beranjak pada pengetahuan yang tidak dapat ditolak dan berakhir kedalam tindakan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan yang ada didalam pemikiran individu tersebut dalam hal ini adalah oknum yang melakukan praktik intoleransi.

Kemudian faktor pemicu praktik intoleransi selain dari adanya konstruksi nilai moral adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami makna dari toleransi. Hal ini diperkuat dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informan yang hampir semuanya belum memahami terkait hakikat dari toleransi itu sendiri. Sebab sebagian besar dari informan menyatakan bahwa toleransi yang dipahami

cuman sebatas membiarkan umat agama lain hidup berdampingan tanpa menyakiti namun tidak dalam hal beribadah.

Fakta ini didukung oleh data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masih banyak dari warga setempat yang memahami makna dari toleransi masih secara sederhana dan cenderung kurang tepat. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan masih dalam batas wajar karena hanya melakukan penolakan terhadap bangunan gereja tidak sampai melakukan kekerasan.

Hal semacam ini bisa terjadi dimungkinkan oleh masih banyaknya oknum masyarakat yang belum memahami makna dari kesetaraan, sehingga dari fenomena ini akan terlahir istilah superior dan inferior. Istilah atau predikat superior disandang oleh kelompok yang memiliki kuantitas yang cenderung banyak dan predikat inferior disandang oleh kelompok yang memiliki kuantitas yang cenderung lebih sedikit. Dari ketidaksetaraan ini kemudian timbul tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi di negara yang heterogen seperti Indonesia ini.

Minimnya pemahaman warga setempat terkait dengan makna toleransi ini diakibatkan dari adanya kondisi psikososial. Sebab didalam suatu kelompok masyarakat terbagi kedalam 2 karakteristik yaitu masyarakat sederhana/ primitif serta masyarakat kompleks dan masyarakat setempat dikategorikan sebagai masyarakat sederhana. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan serba homogen yang meliputi budaya, agama, maupun struktur sosial yang menjadi bagian dari karakteristik yang manusia miliki. Masyarakat dengan karakteristik semacam ini memaknai agama sesuatu hal yang dekat dengan simbol-simbol dan simbol-simbol inilah memegang peran yang sangat dominan didalam keberagaman.

Berdasarkan fakta dilapangan terkait kurangnya pemahaman masyarakat terkait dari makna toleransi dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah akan memaknai agama yang bukan warga setempat anut atau agama orang lain dengan rasa antipati. Masyarakat semacam ini akan susah mengembangkan sikap toleransi, sebab warga cenderung mudah tersinggung, mudah terprovokasi apabila ada suatu ancaman yang akan mengganggu eksistensi agama yang diyakini.

Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat kompleks yang lebih memiliki keterbukaan dalam hal pandangan dan menyikapi suatu realitas sosial. Masalah keberagaman layaknya adalah suatu realitas yang tidak bisa dihindari karena merupakan anugerah dari Tuhan

Yang Maha Esa. Dengan keterbukaannya masyarakat kompleks ini cenderung lebih mudah mengebangkan sikap toleransi dibandingkan dengan masyarakat sederhana.

Memaknai toleransi tidak hanya menghargai teologi atau aqidah serta menghargai iman kepada Tuhan tiap-tiap agama tetapi juga harus memiliki konsensus untuk menghargai budaya dari umat agama itu sendiri. Secara harfiah toleransi beragama harus mampu memberikan kontribusi atas terciptanya masyarakat madani yang terbentuk dan didasari oleh adanya nilai-nilai supranatural. Berdasarkan pokok permasalahan yang terjadi di desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dapat dianalisis bahwa terdapat dua tipe sikap toleransi yang berkembang dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Yang pertama adalah tipe toleransi yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif dimana menurut pemahaman ini warga menganggap agama sendiri benar namun juga masih memberikan ruang untuk membenarkan agama lain. Hal ini selaras dengan pernyataan informan yang menyatakan agama islam adalah agama yang terbaik karena merupakan agama yang dianut namun agama Kristen juga agama yang baik bagi warga yang menganutnya.

Kemudian sikap toleransi yang kedua adalah cukup membiarkan atau mensyaratkan umat agama lain untuk hidup dan mengusiknya. Namun hal ini didasarkan atas keterpaksaan jadi apabila kelompok agama lain dirundung masalah kelompok mayoritas akan cenderung bersikap antipati. Pernyataan ini selaras dengan ungkapan yang dikemukakan oleh informan dengan menyatakan bahwa beliau mengizinkan umat Kristiani mendirikan umat ibadah selama tidak mengganggu maka tidak jadi masalah. Melihat pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa terlihat sikap intoleransi yang ditunjukkan hanya setengah-setengah.

Minimnya pemahaman masyarakat setempat terkait dengan konsep toleransi ini apabila tidak segera diluruskan dikhawatirkan akan terjadi kembali konflik yang sama di waktu yang akan datang entah antar agama antar kelompok masyarakat atau bahkan antar individu semua sangat mungkin terjadi. Sebab pada nyatanya toleransi terlalu dianggap dan dipahami secara sepele dan tidak fundamental sehingga tidak heran bahwa konflik yang serupa sering terjadi. Selain itu terdapat beberapa alasan dasar keyakinan akan adanya dalil-dalil atas agama yang membenarkan perilaku intoleransi dilakukan merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam praktik kekerasan atas nama agama yang terjadi di muka bumi.

Didasari dari kenyataan diatas diperlukan strategi mitigasi supaya konflik keagamaan tidak terjadi kembali di Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus menjadi fasilitator terciptanya diskusi diruang publik supaya permasalahan terkait penolakan pendirian rumah ibadah tidak lagi terjadi. Hal ini sesuai dengan harapan informan yang menginginkan diadakannya diskusi supaya terbentuk solusi yang menguntungkan kedua belah pihak sebab menurut beliau apa yang terjadi juga ada alasan tersendiri tidak tiba-tiba terjadi tanpa alasan. Memang apabila dianalisis konflik yang terjadi dimasyarakat merupakan muara dari lambannya pemerintah dalam penanganan permasalahan ini utamanya dalam kebijakan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah ibadah yang sering kali dijadikan senjata untuk penutupan rumah ibadah dengan dalih illegal.

Seperti yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Luckmann bahwa terdapat 2 gagasan pembentuk kontruksi sosial yaitu: pengetahuan dan yang kedua adalah realitas. Pengetahuan dan realitas terikat oleh konteks sosial yang terdapat sistem, pengetahuan dan realitas bersifat subjektif karena memiliki fase historis yang berbeda-beda. Terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat desa Godean tentang makna toleransi apabila menggunakan pisau analisis dari teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Luckmann hal ini dipengaruhi oleh proses internalisasi pengetahuan sebab setiap individu fase historis atau tempat untuk mendapatkan pengetahuan yang berbeda-beda ada yang dari pendidikan formal, kajian keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga berangkat dari kenyataan ini maka menghasilkan perbedaan dalam memahami makna dari toleransi pada setiap individu.

Kemudian faktor yang ketiga penyebab terjadinya praktik intoleransi adalah munculnya sikap sentimen terhadap adanya kehadiran kelompok lain diluar kelompok mayoritas. Munculnya sentimen inilah dikhawatirkan akan memicu tindakan yang mengancam integrasi bangsa. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan heterogenitas menjadi sebuah negara yang mengusung perbedaan sebagai sebuah konsensus bersama. Semangat persatuan ini kemudian diimplementasikan kedalam nilai-nilai semangat gotong royong yang merupakan panji-panji pembangunan bangsa dan negara menuju visi dan misi negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Timbulnya sentimen ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap agama lain dalam hal ini agama Kristen sebab rata-rata dari pelaku intoleransi hanya menilai dari sisi perbedaannya saja tidak melihat sisi persamaannya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh informan terkait pandangan bahwa agama Kristen

memiliki cara ibadah yang aneh dan memiliki banyak Tuhan. Menyikapi pernyataan dari informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor timbulnya intoleransi adalah adanya prasangka buruk dan pernyataan dari informan tersebut dapat dikategorikan pada suatu prasangka yang nantinya akan mengarah pada kebencian.

Melawan sikap intoleran yang dihasilkan dari adanya sentimen terhadap kelompok lain diperlukan hukum yang mampu menegakkan HAM dan membendung perilaku yang mengarah pada ujaran kebencian dan diskriminasi kepada kaum minoritas. Sebab pada awalnya perilaku intoleran terbentuk dari ketidakpahaman dan ketakutan yang berlebihan dalam menyikapi suatu realitas sosial yakni perbedaan budaya, bangsa, serta agama. Dari adanya ketidakpahaman tersebut akan membentuk suatu prasangka buruk sehingga individu tersebut akan cenderung bersikap arogan dan akan melebih-lebihkan kelompoknya sendiri serta memposisikan kelompok lain sebagai kelompok yang berhak ditindas.

Selain itu timbulnya rasa sentimen juga diakibatkan oleh adanya rasa etnosentris yang berlebihan sebab dengan adanya kecendrungan untuk berfikir bahwa apa yang dianutnya lebih unggul daripada yang lain serta melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Rasa etnosentris akan melahirkan tindakan superior yang akan menganggap rendah kelompok lain. Selain itu dari adanya sikap etnosentris inilah akan membentuk suatu persepsi pada setiap individu dengan menganggap kelompoknya adalah yang paling benar sehingga individu tersebut bisa menindas kelompok lain diluar kelompoknya.

Kemajemukan bangsa Indonesia melahirkan banyak sekali wacana yang perlu dipelajari dan ditanamkan sejak dini sehingga rasa sentimen berupa prasangka buruk seperti yang terjadi di Desa Loceret ini yang berakibat pada praktik intoleransi tidak lagi terjadi. Sebab tidak bisa dipungkiri masih banyak orang yang tidak memahami toleransi dan memahami agama hanya dari kulitnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri disintegrasi bangsa seringkali terjadi dan masalahnya selalu seputar intoleransi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dipicu oleh sentimen yang berkembang dimasyarakat itu sendiri.

Terdapat faktor yang melatarbelakangi terbentuknya prasangka buruk terhadap kelompok lain yakni: munculnya unsur ketidaksukaan pada diri individu, merasa bahwa dirinya adalah mayoritas, unsur kekuatan untuk berlindung dibalik agama. Semua hal tersebut merupakan bagian dari faktor subyektif yang individu miliki. Yang lebih berbahaya lagi apabila semua hal itu berkembang membentuk menjadi sebuah stigma dengan

melihat pola kehidupan dan kegiatan umat agama lain adalah salah dimata pelaku intoleransi berawal dari sinilah timbul sebuah praktik Intoleransi.

Sebuah prasangka yang sudah berkembang menjadi sebuah stigma akan lebih berbahaya lagi apabila menggunakan Tuhan sebagai alat pembenaran kejahatan. Atau dalam kata lain kejahatan yang berlindung dibalik nama Tuhan. Manusia selayaknya menggunakan akal pikirannya untuk berfikir secara komprehensif dan terintegratif dengan memaknai perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan mencapai persatuan dan kesatuan bukan malah membangun kebersamaan guna menindas yang lebih lemah.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dilakukan analisis bahwa sentimen yang terjadi sehingga memicu tindakan intoleransi lebih banyak ditentukan oleh faktor subyektif, salah satunya yang turut memainkan peran adalah faktor lingkungan sekitar. Sentimen keagamaan seringkali bukan karena pengaruh ilmu agama yang tinggi atau pemahaman seseorang terhadap agama itu. Munculnya perasaan atau sentimen beragama tersebut yang berbahaya ketika tidak diimbangi oleh pemahaman yang akurat tentang agama. Dikhawatirkan apa yang dipersepsikan sebagai agama tertantang maka yang pertama akan mendominasi pada diri seseorang adalah "rasa" dan bukan "rasionalitas".

Berangkat dari kenyataan itulah akibatnya timbul respon negatif bahkan terkadang cenderung destruktif. Yang kemudian situasi dan kondisi inilah yang seringkali dilabelisasi sebagai "konflik agama". Padahal sejatinya adalah konflik yang diakibatkan oleh sentimen dan fanatisme agama dan bukan karena agama itu sendiri. Pemahaman yang kurang pas seperti itulah yang membawa kepada kesimpulan bahwa "agama itu harus konflik". Padahal agama-agama itu tidak konflik karena memang sejatinya secara sosial semua agama mengajarkan "nilai-nilai karamah, ihsan, khariyat, dan lain-lain".

Permasalahan terkait perbedaan tidak akan selesai apabila tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan teologis akan selamanya menjadi "*theological discourse*". Jadi harus ada rasa saling menghargai tanpa mempermasalahkan perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam QS Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi Allah SWT berfirman: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "Untukmu agamamu, dan utukku agamaku.". Sehingga konflik agama yang diakibatkan dari adanya sentimen tidak lagi terjadi sebab sudah ada kedewasaan dalam memaknai perbedaan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dipaparkan dapat diketahui bersama terkait praktik intoleransi yang terjadi di desa Godean disebabkan oleh 3 faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan berupa pelarangan pendirian rumah ibadah dan pelarangan kegiatan ibadah bagi jemaat gereja, dimana faktor yang pertama ditimbulkan dari adanya konstruksi nilai moral yang menyimpang yang mana hal itu dianut oleh sebagian besar pelaku intoleransi. Konstruksi nilai moral yang menyimpang ini ditandai dengan munculnya rasa tidak suka apabila ada kelompok lain diluar kelompok mayoritas hidup berdampingan atau bahkan membangun tempat ibadah ditengah-tengah lingkungan mayoritas. Adanya konstruksi nilai moral yang menyimpang ini diperkuat dari adanya fakta dan temuan dilapangan berupa adanya gerakan boikot tempat ibadah yang dilakukan oleh oknum masyarakat setempat dengan memasang spanduk-spanduk bernada provokasi bertuliskan “Relokasi Atau Usir”.

Kemudian faktor yang kedua adalah masih banyak masyarakat setempat yang kurang memahami makna dari toleransi. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan temuan data yang diperoleh dilapangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa warga setempat, dimana hampir semua narasumber masih belum memahami makna dari toleransi. Kurangnya pemahaman terkait toleransi ini sungguh sangat mengkhawatirkan sebab dengan kurangnya pemahaman terkait toleransi masyarakat akan semakin mudah dimobilisasi untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran yang akan menciderai makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu kurangnya pemahaman terkait toleransi dikhawatirkan juga akan menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat sehingga mengancam integrasi nasional.

Faktor yang ketiga dari timbulnya praktik intoleransi di desa Godean adalah munculnya sentimen agama yang berlebihan. Hal ini ditandai dari munculnya rasa etnosentris yang berlebihan pada setiap pelaku intoleransi. Hal ini diperkuat berdasarkan temuan data dilapangan berupa pernyataan dari informan yang terkesan menyudutkan salah satu kelompok agama. Dan akan lebih fatal lagi apabila sentimen sudah mengarah pada stigma dengan mengatasnamakan kebenaran dan agama, maka atas dasar itu semua, fungsi Tuhan digunakan untuk alat pembenaran kejahatan, kekerasan, ancaman dan balas dendam. Padahal apabila setiap individu mau sedikit berfikir secara komprehensif dan terintegratif, perbedaan dalam bentuk pemahaman keagamaan bisa juga menjadi kekuatan membangun kebersamaan guna mencapai tujuan keutuhan serta kemajuan umat manusia.

## Saran

Praktik intoleransi yang terjadi di desa Godean ini seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pihak utamanya bagi pemerintah sehingga konflik yang sama tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Selain sebagai bahan evaluasi permasalahan yang terjadi disini juga dapat dijadikan media edukasi bagi seluruh elemen masyarakat sehingga hal-hal serupa yang akan mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan tidak akan terjadi kembali. Semangat persatuan harus ditingkatkan guna mencapai bangsa tujuan nasional bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. 2016. *Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia*. Jurnal Dinamika Global. Vol. 3. Hal. 123-140
- Ahmad Isnaini. 2017. *Merajut Ukhuwah Islamiyah dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama*. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221>. Diunduh 15 Mei 2021
- Aminah. 2015. “Merajut Ukhuwah Islamiyah dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama,” *Jurnal Cendekia*. Hal. 13-21
- Kusuma. 2018. *Melawan Radikalisme melalui Website*. Jurnal ASPIKOM 3, no. 5. Hal. 943-57. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>. Diunduh 15 Mei 2021
- Lina Herlina. 2018. *Disintegrasi Sosial Dalam Konten Media Sosial Facebook*. Jurnal Pembangunan Sosial 1, no. 2. Hal. 232-58. <https://doi.org/10.15575/jt.vli2.3046>. Diunduh 18 Mei 2021
- Mudzakkir, A. 2007. Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay. In M. Noorsalim, M. Nurkhoiron, & R. Al-Makassary (Eds.), *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Yayasan Interseksi.
- Noorsalim, M., Nurkhoiron, M., & Al-Makassary, R. (Eds.). 2007. *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Yayasan Interseksi.
- Paskarina, C. 2007. Multikulturalisme dalam Memahami Dinamika Politik Lokal: Pendekatan Alternatif di dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Mandatory*, 3(3), Hal. 123-140.
- Pratikno, P. 2013. Exercising freedom: local autonomy and democracy in Indonesia, 1999–2001. In M. Erb, P. Sulistiyanto, & C. Faucher (Eds.), *Regionalism in Post-Suharto Indonesia* (pp. 1–250). New York: RoutledgeCurzon.
- Putri. 2011. “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan ijin Pembangunan Rumah Ibadah,” *Jurnal Dinamika*

*Hukum 11*. Vol 2. Hal. 230-242.

- Rini Fidiyani. 2017. *Kerukunan umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak , Kec. Wamgon. Kab. Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3. Hal. 468-82. [https:// doi.org/ 10.15575/jt.vli2.3046](https://doi.org/10.15575/jt.vli2.3046). Diunduh 18 Mei 2021
- Siti Zuliyah. 2006. “Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 1 Februari 2021.
- Soedrajat, M. R. 2017. *Perkembangan Sosial dan Budaya Terhadap Justifikasi Sosial Keyakinan Spiritual dan Pengetahuan*. Depok: Departemen Filsafat, Universitas Indonesia.
- Soedrajat, M. R. 2017. *Sekularisasi Indonesia sebagai Dekonstruksi Nilai Moral dan Upaya Meminimalkan Diskriminasi Minoritas*. Depok: Departemen Filsafat, Universitas Indonesia.
- Soedrajat, M. R. 2018. *Diskriminasi sebagai Konsekuensi Keterlibatan Masyarakat dengan Dimensi Privat Anggota Masyarakat*. Departemen Filsafat, Universitas Indonesia.
- Wahid Institute. 2011. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*. Jakarta.
- YB. Mangunwijaya. “Pergeseran Titik Berat Dari Keragaman Ke Religiusitas.” In *Spiritualitas Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, II. Vol. 1. Seri Dian. Jakarta: Kanisius, 1994
- Yusar. 2015. “Ruang Publik Sebagai Pendidikan Kesadaran Multikulturalisme,” . Hal. 87-104.